



# MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah penataan, pengelolaan, penyimpanan, penggunaan dan penemuan kembali arsip, perlu memberikan tanda pengenal sebagai isi informasi dalam naskah berdasarkan sistem tata berkas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
4. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
5. Jenis Arsip adalah sekelompok berkas yang memiliki fungsi yang sama, dari rekaman kegiatan sejak awal sampai akhir.
6. Klasifikasi Fasilitatif adalah klasifikasi penunjang yang berkaitan dengan pekerjaan pengorganisasian, prosedur dan kebijakan instansi, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta pekerjaan administrasi internal instansi.
7. Klasifikasi Substantif adalah klasifikasi yang berkaitan dengan fungsi dan tugas sesuai maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan kemasyarakatan.
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
9. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

10. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

#### Pasal 2

Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian dimaksudkan sebagai pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian menjadi beberapa kategori unit informasi arsip untuk penciptaan, penyimpanan, dan penemuan kembali Arsip dengan cepat dan tepat.

#### Pasal 3

Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian disusun berdasarkan:

- a. klasifikasi fasilitatif; dan
- b. klasifikasi substantif.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup klasifikasi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari klasifikasi penunjang yang menyangkut pekerjaan:
  - a. pengorganisasian dan tata laksana;
  - b. prosedur dan kebijakan instansi;
  - c. perencanaan;
  - d. keuangan;
  - e. kepegawaian;
  - f. pengawasan dan pengendalian;
  - g. penelitian dan pengembangan;
  - h. pendidikan dan pelatihan; dan
  - i. data dan informasi.
- (2) Klasifikasi Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu klasifikasi yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai dengan maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan masyarakat.

Pasal 5

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF DAN KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL,  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

- I. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
A. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>PR</b>	<b>PERENCANAAN</b>
<b>PR.01</b>	<b>Penyusunan Rencana</b>
<b>01.01</b>	<b>Perencanaan Umum</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, anggaran, dan kegiatan, serta penetapan kinerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
<b>01.02</b>	<b>Perencanaan Strategis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana strategis rencana jangka panjang dan jangka menengah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
<b>01.03</b>	<b>Sistem dan Standardisasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan rancangan konsolidasi program dan anggaran, aplikasi teknis perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
<b>PR.02</b>	<b>Program dan Anggaran</b>
<b>02.01</b>	<b>Perencanaan Program dan Anggaran</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran tahunan pagu sementara maupun definitif.
<b>02.02</b>	<b>Revisi Anggaran</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perubahan/revisi daftar isian pelaksanaan anggaran.
<b>02.03</b>	<b>Telaah Kepatuhan Anggaran</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan kepatuhan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan.
<b>02.04</b>	<b>Evaluasi, Laporan Program dan Anggaran</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan program dan anggaran di Unit Kerja Pusat (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal,

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	Direktorat Jenderal) dan Unit Kerja Daerah, serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
<b>PR.03</b>	<b>Kerja Sama</b>
<b>03.01</b>	<b>Kerja Sama Dalam Negeri (DN)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan administrasi kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama dalam negeri.
<b>03.02</b>	<b>Kerja Sama Luar negeri (LN)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan administrasi kerja sama, perjalanan dinas luar negeri dan hibah luar negeri, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama luar negeri.
<b>PR.04</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b>
<b>04.01</b>	<b>Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan kendali mutu kegiatan dan penganggaran kegiatan pertanahan dan tata ruang.
<b>04.02</b>	<b>Evaluasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan bimbingan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran.
<b>04.03</b>	<b>Penyusunan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta pengelolaan data dan informasi perencanaan dan kerja sama.
<b>KP</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>
<b>KP.01</b>	<b>Pengembangan Pegawai</b>
<b>01.01</b>	<b>Pengadaan dan Pengembangan Kapasitas Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pengadaan, penyiapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan kapasitas pegawai.
<b>01.02</b>	<b>Karier Jabatan Struktural dan Fungsional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan analisis pola karir, koordinasi, dan pengusulan karier pegawai yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, pelaksanaan ujian jabatan bagi pegawai, pengelolaan administrasi jabatan fungsional serta izin pencantuman gelar.
<b>01.03</b>	<b>Penilaian dan Kompetensi Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan penyiapan bahan pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai.
<b>KP.02</b>	<b>Mutasi Kepegawaian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pengambilan sumpah

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	jabatan atau janji, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai serta mutasi kepegawaian pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III.
<b>02.01</b>	<b>Pengangkatan CPNS menjadi PNS</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS).
<b>02.02</b>	<b>Kenaikan Pangkat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan tentang kenaikan pangkat.
<b>02.03</b>	<b>Mutasi Kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan tentang mutasi kerja.
<b>02.04</b>	<b>Pemberhentian dan Pensiun</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan tentang pemberhentian dan pensiun pegawai.
<b>02.05</b>	<b>Pengambilan Sumpah dan Janji</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan tentang pengambilan sumpah dan janji.
<b>02.06</b>	<b>Kenaikan Gaji Berkala (KGB)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan tentang Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
<b>02.07</b>	<b>Cuti Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan tentang Cuti Pegawai.
<b>02.08</b>	<b>Pengangkatan dan Mutasi dalam Jabatan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan tentang pengangkatan dan mutasi dalam jabatan.
<b>02.09</b>	<b>Mutasi dari/ke Instansi Lain</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan tentang mutasi dari dan ke instansi lain (lolos butuh).
<b>KP.03</b>	<b>Administrasi Kepegawaian</b>
<b>03.01</b>	<b>Sistem Informasi Kepegawaian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.
<b>03.02</b>	<b>Tata Naskah Kepegawaian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan yang berkaitan dengan tata naskah khusus masalah kepegawaian
<b>03.03</b>	<b>LHKPN/LHKASN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan asistensi dan monitoring LHKPN/LHKASN.
<b>KP.04</b>	<b>Kinerja</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pengelolaan dan penilaian kinerja, penghitungan tunjangan kinerja, penghargaan kinerja kepada PNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.



<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>KP.05</b>	<b>Kesejahteraan Pegawai</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberian kesejahteraan pegawai.
<b>05.01</b>	<b>Tabungan Perumahan (Taperum)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan pengembalian Tabungan Perumahan (Taperum) bagi pegawai yang telah pensiun.
<b>05.02</b>	<b>Asuransi Kesehatan dan Karpeg/Karsu/Karis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Asuransi Kesehatan Pegawai (Askes/BPJS), pengurusan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Suami (Karsu)/Kartu Istri (Karis).
<b>05.03</b>	<b>Tanda Jasa</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan pemberian penghargaan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil.
<b>KP.06</b>	<b>Penegakan Disiplin dan Kode Etik</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan penegakan disiplin dan kode etik pegawai, dan koordinasi penegakan tindakan disiplin dengan Inspektorat Jenderal serta pengelolaan absensi.
<b>OT</b>	<b>ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b>
<b>OT.01</b>	<b>Organisasi</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penataan dan penguatan organisasi meliputi evaluasi tipe kantor, pembentukan kantor dan perwakilan kantor, serta evaluasi kelembagaan berkaitan dengan struktur organisasi, tata kerja dan tugas fungsi kelembagaan.
<b>OT.02</b>	<b>Tata Laksana</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penataan dan penguatan tata laksana meliputi norma, standar, prosedur dan mekanisme kerja, serta penilaian kinerja kantor.
<b>OT.03</b>	<b>Analisis Jabatan</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan analisis jabatan, meliputi analisis beban kerja, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, peningkatan kapasitas organisasi dan kinerja organisasi.
<b>KU</b>	<b>KEUANGAN</b>
<b>KU.01</b>	<b>Anggaran dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)</b>
<b>01.01</b>	<b>Penyusunan Anggaran</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dan belanja pegawai.
<b>01.02</b>	<b>Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	pelaksanaan fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
<b>01.03</b>	<b>Pengelolaan Anggaran</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan belanja pegawai untuk satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
<b>01.04</b>	<b>Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pemanfaatan PNBP terintegrasi baik untuk satuan kerja Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
<b>01.05</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan anggaran dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk satuan kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
<b>KU.02</b>	<b>Perbendaharaan dan Tata Laksana Keuangan</b>
<b>02.01</b>	<b>Perbendaharaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi, petunjuk teknis, pemantauan, pelaporan penyelesaian kerugian negara dan perbendaharaan.
<b>02.02</b>	<b>Pencairan Anggaran</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan urusan administrasi pencairan anggaran Kantor Pusat Kementerian, pelaksanaan pemantauan pencairan anggaran di tingkat pusat dan daerah, serta pengembalian setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
<b>02.03</b>	<b>Tata Laksana Keuangan dan Tata Usaha Biro</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi keuangan, pembayaran biaya pindah mutasi/pemulangan pensiun, inventarisasi dan pelaporan rekening pemerintah serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
<b>KU.03</b>	<b>Akuntansi dan Pelaporan</b>
<b>03.01</b>	<b>Rekonsiliasi Data dan Penyusunan Laporan Keuangan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan rekonsiliasi data dan penyusunan laporan keuangan UAKPA, UAPA, UAPPA-E1, UAPPAW, dan akuntansi.
<b>03.02</b>	<b>Verifikasi dan Sinkronisasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan verifikasi dan sinkronisasi data laporan keuangan.
<b>03.03</b>	<b>Realisasi Anggaran dan Neraca</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan analisis realisasi pelaksanaan anggaran dan neraca UAPPA-E1 Kantor Pusat dan UAPPAW Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
<b>03.04</b>	<b>LHP</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyelesaian tindak lanjut LHP.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>03.05</b>	<b>Hibah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan pengelolaan dan pelaporan pendapatan hibah langsung.
<b>KU.04</b>	<b>Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)</b>
<b>04.01</b>	<b>Rekonsiliasi Data</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan rekonsiliasi data pengelolaan barang milik Negara.
<b>04.02</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik negara, dan kompilasi data/neraca barang milik negara, menyusun laporan barang milik negara pada masing-masing tingkat satuan kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
<b>04.03</b>	<b>Sengketa dan Surat Keputusan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan analisis sengketa barang milik negara, dan menyiapkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pembuatan BAST BMN.
<b>04.04</b>	<b>Monitoring dan Koordinasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan monitoring dan koordinasi penyelesaian temuan auditor internal maupun eksternal.
<b>HK</b>	<b>HUKUM</b>
<b>HK.01</b>	<b>Program Legislasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun program legislasi nasional.
<b>HK.02</b>	<b>Perundang-undangan</b>
<b>02.01</b>	<b>Perundang-undangan Lingkup Pengaturan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat pengaturan dari pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
<b>02.02</b>	<b>Perundang-undangan Lingkup Penetapan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya penetapan dari pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
<b>HK.03</b>	<b>Advokasi</b>
<b>03.01</b>	<b>Pertimbangan dan Konsultasi Hukum</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian pertimbangan dan konsultasi hukum serta penyusunan naskah perjanjian/kerja sama/peraturan bersama.
<b>03.02</b>	<b>Advokasi Hukum</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	penyiapan bahan koordinasi dan pelayanan advokasi hukum baik sebagai saksi ahli, penasihat hukum maupun bantuan hukum.
<b>HK.04</b>	<b>Dokumentasi Hukum</b>
<b>04.01</b>	<b>Dokumentasi Hukum</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
<b>04.02</b>	<b>Jaringan Informasi Hukum</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan dan pengelolaan jaringan informasi hukum.
<b>HM</b>	<b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b>
<b>HM.01</b>	<b>Hubungan Antar Lembaga</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan hubungan antar lembaga baik pemerintah maupun swasta, pers dan media massa.
<b>HM.02</b>	<b>Media Center/Publikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendokumentasian dan publikasi kegiatan menteri dan pimpinan serta pengelolaan media center
<b>HM.03</b>	<b>Layanan Pengaduan Informasi dan Penyuluhan Masyarakat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pengaduan, penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
<b>TU</b>	<b>KETATAUSAHAAN</b>
<b>TU.01</b>	<b>Persuratan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan urusan tata usaha pelayanan tata naskah dinas .
<b>01.01</b>	<b>Persuratan Khusus</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat yang ditandatangani oleh Menteri dan/atau eselon I atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
<b>01.02</b>	<b>Persuratan Umum</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat yang ditandatangani oleh selain Menteri dan/atau atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
<b>TU.02</b>	<b>Kearsipan</b>
<b>02.01</b>	<b>Pengelolaan Kearsipan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kearsipan meliputi penyimpanan, pemeliharaan, dan pengelolaan arsip sandi (komunikasi kedinasan biasa, komunikasi kedinasan dalam bentuk kode sandi, dan hasil transliterasi sandi).
<b>02.02</b>	<b>Layanan Arsip</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman dan penggunaan arsip di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>02.03</b>	<b>Pembinaan Kearsipan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan Kearsipan yang meliputi sosialisasi/penyuluhan kearsipan, bimbingan teknis, supervisi dan monitoring.
<b>02.03</b>	<b>Jadwal Retensi Arsip (JRA)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA).
<b>02.04</b>	<b>Penyusutan Arsip</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dan penyerahan arsip statis, serta penyusunan dan persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA).
<b>TU.03</b>	<b>Ketatausahaan Pimpinan</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan urusan ketatausahaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Jendral, dan Staf Ahli.
<b>TU.04</b>	<b>Keprotokolanan</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan urusan protokol bagi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Staf Ahli.
<b>TU.05</b>	<b>Rumah Tangga</b>
<b>05.01</b>	<b>Urusan Dalam</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan urusan kebersihan gedung, halaman, taman, penyiapan prasarana dan sarana, kegiatan rapat, upacara, penyelenggaraan kesehatan pegawai, urusan administrasi perjalanan dinas dan administrasi pengelolaan kebersihan.
<b>05.02</b>	<b>Pengelolaan Gedung dan Kendaraan Dinas</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyiapan bahan inventarisasi dan pemeliharaan sarana prasarana fisik kantor pusat dan rumah dinas menteri pengurusan, penggunaan pendistribusian dan perbaikan kendaraan dinas, serta pengurusan surat-surat kendaraan dinas pendistribusian BBM.
<b>05.03</b>	<b>Pengamanan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan keamanan menteri/kepala dan para pimpinan serta urusan pengamanan dalam di lingkungan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
<b>PL</b>	<b>PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN</b>
<b>PL.01</b>	<b>Perlengkapan</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyiapan bahan analisis perencanaan, kebijakan, kebutuhan sarana dan prasarana serta penganggarannya, koordinasi kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana, monitoring, pembangunan, perawatan/renovasi/rehabilitasi gedung, serta pembinaan pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>PL.02</b>	<b>Layanan Pengadaan</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyiapan bahan pengumpulan data, harga dan mutu untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, koordinasi dan monitoring rencana pengadaan, pembinaan kelembagaan unit layanan pengadaan (ULP) dan sumber daya ULP/pejabat pengadaan serta pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian.
<b>PL.03</b>	<b>Penyimpanan, Distribusi dan Pelaporan</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, kegiatan dan penganggaran pemeriksaan penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan hasil pengadaan serta pengelolaan gudang.
<b>PL.04</b>	Pengelolaan Layanan Pertanahan
<b>PW</b>	<b>PENGAWASAN</b>
<b>PW.01</b>	<b>Pengawasan Inspektorat Wilayah I</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di lingkungan Wilayah I meliputi Ditjen III, Itjen, Pusdatin, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat
<b>01.01</b>	<b>Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan pengawasan intern terhadap audit kinerja di Inspektorat Wilayah I.
<b>01.02</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Intern</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan intern terhadap audit kinerja di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I.
<b>01.03</b>	<b>Pengawasan untuk Tujuan Tertentu</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan terhadap audit dengan tujuan tertentu lingkungan Wilayah I.
<b>01.04</b>	<b>Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkungan Wilayah I.
<b>PW.02</b>	<b>Pengawasan Inspektorat Wilayah II</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di lingkungan Wilayah II meliputi Ditjen I, Ditjen IV, Pusdiklat, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Provinsi Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku dan Gorontalo.
<b>02.01</b>	<b>Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan pengawasan intern terhadap audit kinerja di Inspektorat Wilayah II.
<b>02.02</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Intern</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan intern terhadap audit kinerja di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah II.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>02.03</b>	<b>Pengawasan untuk Tujuan Tertentu</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan terhadap audit dengan tujuan tertentu lingkungan Wilayah II.
<b>02.04</b>	<b>Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkungan Wilayah II.
<b>PW.03</b>	<b>Pengawasan Inspektorat Wilayah III</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan Wilayah III meliputi meliputi Ditjen II , Ditjen IV, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
<b>03.01</b>	<b>Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan pengawasan intern terhadap audit kinerja di Inspektorat Wilayah III.
<b>03.02</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Intern</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan intern terhadap audit kinerja di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah III.
<b>03.03</b>	<b>Pengawasan untuk Tujuan Tertentu</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan terhadap audit dengan tujuan tertentu lingkungan Wilayah III.
<b>03.04</b>	<b>Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkungan Wilayah III.
<b>PW.04</b>	<b>Pengawasan Inspektorat Wilayah IV</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di lingkungan Wilayah IV meliputi meliputi lingkungan Setjen, Ditjen VII, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Provinsi Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
<b>04.01</b>	<b>Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan pengawasan intern terhadap audit kinerja di Inspektorat Wilayah IV.
<b>04.02</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Intern</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan intern terhadap audit kinerja di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah IV.
<b>04.03</b>	<b>Pengawasan untuk Tujuan Tertentu</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan terhadap audit dengan tujuan tertentu lingkungan Wilayah IV.
<b>04.04</b>	<b>Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkungan Wilayah IV.
<b>PW.05</b>	<b>Pengawasan Inspektorat Wilayah V</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di lingkungan Wilayah V meliputi lingkungan

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	Ditjen V, Puslitbang, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bali, Papua dan Papua Barat
<b>05.01</b>	<b>Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan pengawasan intern terhadap audit kinerja di Inspektorat Wilayah V.
<b>05.02</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Intern</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan intern terhadap audit kinerja di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah V.
<b>05.03</b>	<b>Pengawasan untuk Tujuan Tertentu</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan terhadap audit dengan tujuan tertentu lingkungan Wilayah V.
<b>05.04</b>	<b>Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkungan Wilayah V.
<b>DL</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>
<b>DL.01</b>	<b>Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</b>
<b>01.01</b>	<b>Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan pedoman, metode, kurikulum, dan materi pendidikan dan pelatihan.
<b>01.02</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
<b>DL.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>
<b>02.01</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Struktural</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi, dan rencana penyelenggaraan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural
<b>02.02</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Fungsional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi, dan rencana penyelenggaraan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional.
<b>02.03</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan rencana penyelenggaraan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
<b>02.04</b>	<b>Database Widyaiswara/Tenaga Pengajar</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan <i>database</i> Widyaiswara/Tenaga Pengajar
<b>02.05</b>	<b>Database Alumni Diklat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan <i>database</i> alumni pendidikan dan pelatihan



<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>LB</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
<b>LB.01</b>	<b>Program dan Kerja Sama</b>
<b>01.01</b>	<b>Program</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan program dan anggaran dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
<b>01.02</b>	<b>Kerja Sama</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan
<b>LB.02</b>	<b>Publikasi dan Perpustakaan</b>
<b>02.01</b>	<b>Publikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan diseminasi, forum ilmiah, penghimpunan dan penetapan materi publikasi ilmiah.
<b>02.02</b>	<b>Perpustakaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perpustakaan dan penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi serta distribusi hasil penelitian dan pengembangan.
<b>LB.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
<b>DI</b>	<b>DATA DAN INFORMASI</b>
<b>DI.01</b>	<b>Pengembangan dan Standarisasi Sistem Teknologi Informasi</b>
<b>01.01</b>	<b>Pengembangan Sistem Teknologi Informasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pengembangan dan standarisasi Sistem teknologi informasi serta penyusunan pelaksanaan strategi perancangan, pengembangan, penyediaan, pelayanan, penerapan, pemeliharaan dan standarisasi sistem teknologi informasi.
<b>01.02</b>	<b>Standarisasi Sistem Teknologi Informasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan penyusunan standar mutu, keamanan, kehandalan, dan kesesuaian sistem teknologi informasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan dan standarisasi sistem teknologi informasi.
<b>DI.02</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian dan Tata Ruang</b>
<b>02.01</b>	<b>Pengelolaan Data Pertanian dan Tata Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan data pertanian dan tata ruang.
<b>02.02</b>	<b>Penyajian Informasi Pertanian dan Tata Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyajian informasi pertanian dan tata ruang.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>DI.03</b>	<b>Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>
<b>03.01</b>	<b>Pengelolaan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pengelolaan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
<b>03.02</b>	<b>Penyajian Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan penyajian informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

B. KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>TR</b>	<b>PERENCANAAN TATA RUANG</b>
<b>TR.01</b>	<b>Kebijakan Perencanaan Tata Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan dan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Kemitraan, Perencanaan Tata Ruang, Perencanaan Tata Ruang Nasional dan Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan konsep final.
<b>TR.02</b>	<b>Perencanaan dan Kemitraan Bidang Perencanaan Tata Ruang</b>
<b>02.01</b>	<b>Perencanaan Umum Bidang Perencanaan Tata Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan perencanaan umum dan program di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional.
<b>02.02</b>	<b>Monitoring Evaluasi Bidang Perencanaan Tata Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional.
<b>02.03</b>	<b>Data dan Informasi Bidang Perencanaan Tata Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional.
<b>02.04</b>	<b>Kemitraan Bidang Perencanaan Tata Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi non pemerintah dan pemberdayaan masyarakat bidang perencanaan tata ruang.
<b>TR.03</b>	<b>Pedoman Perencanaan Tata Ruang</b>
<b>03.01</b>	<b>Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria) di bidang perencanaan tata ruang kawasan perkotaan.
<b>03.02</b>	<b>Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Pedesaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria) di bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan pedesaan.
<b>TR.04</b>	<b>Perencanaan Tata Ruang Nasional</b>
<b>04.01</b>	<b>Tata Ruang Wilayah Nasional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang perencanaan tata ruang, serta penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
<b>04.02</b>	<b>Tata Ruang Wilayah Pulau dan Kepulauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera,

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
<b>04.03</b>	<b>Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang perencanaan tata ruang, penyusunan serta peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perbatasan negara di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Pulau Papua dan laut lepas termasuk pulau-pulau kecil terluar.
<b>TR.05</b>	<b>Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I</b>
<b>05.01</b>	<b>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan dan strategi nasional tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Bali.
<b>05.02</b>	<b>Penyusunan dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali tata ruang kawasan Strategis Nasional di Wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Bali
<b>TR.06</b>	<b>Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II</b>
<b>06.01</b>	<b>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali tata ruang kawasan Strategis Nasional di Wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
<b>06.02</b>	<b>Penyusunan dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali tata ruang kawasan Strategis Nasional di Wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
<b>PF</b>	<b>PEMANFAATAN RUANG</b>
<b>PF.01</b>	<b>Kebijakan Pemanfaatan Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan dan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Kemitraan, Pemanfaatan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Kepulauan dan Pulau dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan konsep final.
<b>PF.02</b>	<b>Perencanaan dan Kemitraan Bidang Pemanfaatan Ruang</b>
<b>02.01</b>	<b>Perencanaan Umum Bidang Pemanfaatan Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan strategi, pelaksanaan program perencanaan umum pemanfaatan ruang.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>02.02</b>	<b>Monitoring Evaluasi Bidang Pemanfaatan Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan teknis dan program di bidang pemanfaatan ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan Kawasan Strategis Nasional.
<b>02.03</b>	<b>Data dan Informasi Bidang Pemanfaatan Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi di bidang pemanfaatan ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan Kawasan Strategis Nasional.
<b>02.04</b>	<b>Kemitraan Bidang Pemanfaatan Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan organisasi non pemerintah dan pemberdayaan masyarakat bidang pemanfaatan ruang.
<b>PF.03</b>	<b>Pedoman Pemanfaatan Ruang</b>
<b>03.01</b>	<b>Pedoman Keterpaduan Pemanfaatan Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta penyusunan pedoman di bidang keterpaduan pemanfaatan ruang.
<b>03.02</b>	<b>Pedoman Penataan Kawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta penyusunan pedoman di bidang penataan kawasan.
<b>PF.04</b>	<b>Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Kepulauan dan Pulau</b>
<b>04.01</b>	<b>Pemanfaatan Ruang Nasional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang Wilayah Nasional.
<b>04.02</b>	<b>Pemanfaatan Ruang Kepulauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang Wilayah Kepulauan
<b>04.03</b>	<b>Pemanfaatan Ruang Pulau</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang Wilayah Pulau
<b>04.04</b>	<b>Koordinasi Pemanfaatan Penataan Ruang Nasional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan koordinasi penataan ruang nasional lintas sektor
<b>04.05</b>	<b>Buletin Tata Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan dan penyusunan buletin yang berkaitan dengan Tata Ruang
<b>PF.05</b>	<b>Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional</b>
<b>05.01</b>	<b>Rencana Tata Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
<b>05.02</b>	<b>Sinkronisasi Program</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	pelaksanaan sinkronisasi program sektoral dan program kewilayahan dan sinkronisasi program sektor strategis pada kawasan strategis nasional di Wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Bali, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
<b>05.03</b>	<b>Koordinasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan,
<b>PK</b>	<b>PENATAAN KAWASAN</b>
<b>PK.01</b>	<b>Kebijakan Penataan Kawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan dan penyusunan kebijakan perencanaan dan kemitraan penataan kawasan, penataan kawasan perkotaan, penataan kawasan pedesaan, penataan kawasan ekonomi dan penataan kawasan baru mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan konsep final.
<b>PK.02</b>	<b>Perencanaan dan Kemitraan Penataan Kawasan</b>
<b>02.01</b>	<b>Perencanaan Umum Penataan Kawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan penyusunan rencana dan program di bidang penataan dan pengembangan kawasan.
<b>02.02</b>	<b>Monitoring Evaluasi Penataan Kawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis dan program di bidang penataan dan pengembangan kawasan.
<b>02.03</b>	<b>Data dan Informasi Penataan Kawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi di bidang penataan dan pengembangan kawasan.
<b>02.04</b>	<b>Kemitraan Hal Penataan Kawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan organisasi pemerintah dan pemberdayaan masyarakat bidang penataan dan pengembangan kawasan.
<b>PK.03</b>	<b>Penataan Kawasan Perkotaan</b>
<b>03.01</b>	<b>Pengembangan, Perwujudan dan Pengelolaan Kawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan, penyusunan konsep, penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perkotaan di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
<b>03.02</b>	<b>Koordinasi Penataan Kawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan kawasan perkotaan di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>PK.04</b>	<b>Penataan Kawasan Pedesaan</b>
04.01	<p><b>Pengembangan, Perwujudan dan Pengelolaan Kawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan, penyusunan konsep, penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan pedesaan di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.</p>
04.02	<p><b>Koordinasi Penataan Kawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan kawasan pedesaan di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.</p>
<b>PK.05</b>	<b>Penataan Kawasan Ekonomi</b>
05.01	<p><b>Pengembangan, Perwujudan dan Pengelolaan Kawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan, penyusunan konsep, penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan ekonomi di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.</p>
05.02	<p><b>Koordinasi Penataan Kawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan pada kawasan ekonomi di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.</p>
<b>PK.06</b>	<b>Penataan Kawasan Baru</b>
06.01	<p><b>Pengembangan, Perwujudan dan Pengelolaan Kawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan, penyusunan konsep, penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan baru di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.</p>
06.02	<p><b>Koordinasi Penataan Kawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan pada kawasan baru di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.</p>
<b>PB</b>	<b>PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH</b>
PB.01	<p><b>Kebijakan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan dan penyusunan kebijakan perencanaan dan kemitraan, pembinaan wilayah I, pembinaan wilayah II,</p>

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	pembinaan wilayah III dan pembinaan wilayah IV mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan konsep final.
<b>PB.02</b>	<b>Perencanaan dan Kemitraan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah</b>
<b>02.01</b>	<b>Perencanaan Umum Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rencana dan program di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah.
<b>02.02</b>	<b>Monitoring Evaluasi Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah.
<b>02.03</b>	<b>Data dan Informasi Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah.
<b>02.04</b>	<b>Kemitraan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan organisasi non pemerintah dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah.
<b>PB.03</b>	<b>Pembinaan Wilayah I</b>
<b>03.01</b>	<b>Bina Provinsi dan Kabupaten</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang provinsi dan kabupaten di wilayah Pulau Sumatera.
<b>03.02</b>	<b>Bina Kota dan Perkotaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kota dan perkotaan wilayah Pulau Sumatera.
<b>PB.04</b>	<b>Pembinaan Wilayah II</b>
<b>04.01</b>	<b>Bina Provinsi dan Kabupaten</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang provinsi dan kabupaten di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.
<b>04.02</b>	<b>Bina Kota dan Perkotaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kota dan Perkotaan wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.
<b>PB.05</b>	<b>Pembinaan Wilayah III</b>
<b>05.01</b>	<b>Bina Provinsi dan Kabupaten</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang provinsi dan kabupaten di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
<b>05.02</b>	<b>Bina Kota dan Perkotaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan



<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kota dan perkotaan wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
<b>PB 06</b>	<b>Pembinaan Wilayah IV</b>
<b>06.01</b>	<b>Bina Provinsi dan Kabupaten</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang provinsi dan kabupaten di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
<b>06.02</b>	<b>Bina Kota dan Perkotaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kota dan perkotaan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
<b>PB 07</b>	<b>Bimbingan</b>
<b>07.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.
<b>07.02</b>	<b>Bantuan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bantuan Teknis Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang.
<b>07.03</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
<b>07.04</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.
<b>PU</b>	<b>PENGUKURAN DAN PEMETAAN DASAR</b>
<b>PU.01</b>	<b>Pengukuran Dasar</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengukuran dasar.
<b>01.02</b>	<b>Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran dasar.
<b>01.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengukuran dasar.
<b>PU.02</b>	<b>Peralatan</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peralatan survei, pengukuran dan pemetaan.
<b>02.02</b>	<b>Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peralatan survei, pengukuran dan pemetaan.
<b>02.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peralatan survei, pengukuran dan pemetaan.
<b>PU.03</b>	<b>Pemetaan Dasar</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemetaan dasar.
<b>03.02</b>	<b>Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dasar.
<b>03.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dasar.
<b>PU.04</b>	<b>Pembinaan Surveyor</b>
<b>04.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan surveyor.
<b>04.02</b>	<b>Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan surveyor.
<b>04.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan surveyor.
<b>PU.05</b>	<b>Sinkronisasi Pengelolaan Data Dasar</b>
<b>05.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sinkronisasi data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang.
<b>05.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sinkronisasi data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang.
<b>05.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sinkronisasi data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>PU.06</b>	<b>Informasi (Pengelolaan) Data Dasar</b>
<b>06.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang.
<b>06.02</b>	<b>Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang.
<b>06.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang.
<b>UK</b>	<b>PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL</b>
<b>UK.01</b>	<b>Pengukuran Kadastral Bidang Tanah</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengukuran kadastral dan pengukuran batas bidang tanah.
<b>01.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran kadastral dan pengukuran batas bidang tanah.
<b>01.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengukuran kadastral dan pengukuran batas bidang tanah.
<b>UK.02</b>	<b>Pengukuran Kadastral Ruang dan Perairan</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengukuran batas ruang dan perairan
<b>02.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran batas ruang dan perairan
<b>02.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengukuran batas ruang dan perairan
<b>UK.03</b>	<b>Pemetaan Kadastral Bidang Tanah</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	kriteria di bidang pemetaan kadastral dan pemetaan batas bidang tanah
<b>03.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral dan pemetaan batas bidang tanah
<b>03.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan kadastral dan pemetaan batas bidang tanah.
<b>UK.04</b>	<b>Pemetaan Ruang dan Perairan</b>
<b>04.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemetaan ruang dan perairan.
<b>04.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan ruang dan perairan.
<b>04.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan ruang dan perairan.
<b>UK.05</b>	<b>Sinkronisasi Pengelolaan Data Kadastral</b>
<b>05.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sinkronisasi data batas bidang tanah, ruang dan perairan.
<b>05.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sinkronisasi data batas bidang tanah, ruang dan perairan.
<b>05.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sinkronisasi data batas bidang tanah, ruang dan perairan
<b>05.04</b>	<b>Informasi Data Kadastral</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi data batas bidang tanah, ruang dan perairan

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>ST</b>	<b>SURVEI DAN PEMETAAN TEMATIK</b>
<b>ST.01</b>	<p><b>Kebijakan Survei dan Pemetaan Tematik</b>                      Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan dan penyusunan kebijakan Tematik Pertanahan, Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, dan Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan konsep final.</p>
<b>ST.02</b>	<b>Tematik Pertanahan</b>
<b>02.01</b>	<p><b>Survei Tematik Pertanahan</b>                      Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan survei tematik pertanahan.</p>
<b>02.02</b>	<p><b>Pemetaan</b>                      Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemetaan.</p>
<b>02.03</b>	<p><b>Analisis Tematik Pertanahan</b>                      Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan analisis Tematik Pertanahan.</p>
<b>02.04</b>	<p><b>Bimbingan Teknis</b>                      Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis terkait dengan Tematik Pertanahan.</p>
<b>02.05</b>	<p><b>Supervisi</b>                      Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi terkait dengan tematik pertanahan.</p>
<b>02.06</b>	<p><b>Monitoring dan Evaluasi</b>                      Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan tematik pertanahan.</p>
<b>ST.03</b>	<b>Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu</b>
<b>03.01</b>	<p><b>Survei Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu</b>                      Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan survei tematik tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu.</p>
<b>03.02</b>	<p><b>Pemetaan Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu</b>                      Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemetaan tematik tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu.</p>
<b>03.03</b>	<p><b>Bimbingan Teknis</b>                      Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis terkait dengan tematik tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu</p>
<b>03.04</b>	<p><b>Supervisi</b>                      Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi terkait dengan tematik tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu</p>
<b>03.05</b>	<p><b>Monitoring dan Evaluasi</b>                      naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan tematik tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu</p>
<b>ST.04</b>	<b>Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi</b>
<b>04.01</b>	<p><b>Survei Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi</b>                      Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan</p>

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	pelaksanaan survei tematik agraria dan sosial ekonomi
<b>04.02</b>	<b>Pemetaan Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemetaan tematik agraria dan sosial ekonomi
<b>04.03</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis terkait dengan tematik agraria dan sosial ekonomi
<b>04.04</b>	<b>Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Supervisi terkait dengan tematik agraria dan sosial ekonomi
<b>04.05</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan tematik agraria dan sosial ekonomi
<b>HT</b>	<b>PENGATURAN DAN PENETAPAN HAK TANAH DAN RUANG</b>
<b>HT.01</b>	<b>Penetapan Hak Guna Usaha</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka masalah penetapan hak guna usaha.
<b>01.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi menyangkut kegiatan penetapan hak guna usaha
<b>01.03</b>	<b>Inventarisasi dan Identifikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak guna usaha.
<b>01.04</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penetapan dan penetapan kembali hak guna usaha serta perpanjangan jangka waktu pendaftaran bagi perseorangan dan badan hukum swasta.
<b>HT.02</b>	<b>Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka masalah penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai.
<b>02.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi menyangkut kegiatan penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai.
<b>02.03</b>	<b>Inventarisasi dan Identifikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>02.04</b>	<b>Perizinan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya, penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik.
<b>02.05</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan badan hukum swasta dan badan sosial/keagamaan, serta penegasan sebagai tanah wakaf.
<b>HT.03</b>	<b>Penetapan Hak Atas Ruang, Hak Komunal dan Perpanjangan Hak</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka penetapan hak atas ruang, hak komunal serta perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.
<b>03.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi menyangkut kegiatan dalam rangka penetapan hak atas ruang, hak komunal serta perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.
<b>03.03</b>	<b>Inventarisasi dan Identifikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penetapan hak atas ruang, hak komunal serta perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.
<b>03.04</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penetapan hak atas ruang, hak komunal serta perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.
<b>HR</b>	<b>PENGATURAN DAN PENDAFTARAN HAK TANAH, RUANG DAN PPAT</b>
<b>HR.01</b>	<b>Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka masalah pendaftaran hak tanah dan ruang.
<b>01.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi menyangkut kegiatan pendaftaran hak tanah dan ruang.
<b>01.03</b>	<b>Izin Hak Tanah dan Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan pelaksanaan pemberian izin pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, serta peralihan saham.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>01.04</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendaftaran tanah pertama kali, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, komunal, dan wakaf
<b>01.05</b>	<b>Spesifikasi Teknis Tanah dan Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan spesifikasi teknis blanko buku tanah, guna ruang/surat ukur/sertipikat dan blanko lembar tambahan untuk buku tanah, guna ruang/surat ukur/sertipikat. (Surat pendaftaran hak tanah, Risalah Pengolahan Data (RPD), surat izin pelepasan hak, peralihan saham, perubahan penggunaan/pemanfaatan, spesifikasi teknis blanko buku tanah, dll, laporan kegiatan pembinaan dan supervisi, laporan monitoring evaluasi).
<b>HR.02</b>	<b>Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Ruang</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka masalah pemeliharaan data hak tanah dan ruang.
<b>02.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi menyangkut kegiatan pemeliharaan data hak tanah dan ruang.
<b>02.03</b>	<b>Izin Pemeliharaan Hak Tanah dan Ruang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan penyiapan pemberian izin peralihan hak
<b>02.04</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka peralihan hak, pembebanan hak dan pemeliharaan data atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun, hak atas ruang, komunal, wakaf, pendaftaran tanah lainnya.
<b>HR.03</b>	<b>PPAT</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka masalah pengadaan, pengembangan, pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali, pemberhentian, penyusunan formasi PPAT, penyusunan daerah wilayah kerja (regional), sanksi, cuti, perubahan data PPAT dan penyusunan dan pengelolaan basis data dan pemegang/penerima protokol PPAT
<b>03.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi menyangkut kegiatan pengadaan, pengembangan, pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali, pemberhentian, penyusunan formasi PPAT, penyusunan daerah wilayah kerja (regional), sanksi, cuti,



<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	perubahan data PPAT dan penyusunan dan pengelolaan basis data dan pemegang/penerima protokol PPAT.
<b>03.03</b>	<b>Spesifikasi Teknis PPAT</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan spesifikasi teknis blanko Akta PPAT dan penyiapan spesifikasi teknis Formulir Akta PPAT.
<b>03.04</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengadaan, pengembangan, pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali, pemberhentian, penyusunan formasi PPAT, penyusunan daerah wilayah kerja (regional), sanksi, cuti, perubahan data PPAT dan penyusunan dan pengelolaan basis data dan pemegang/penerima protokol PPAT.
<b>PH</b>	<b>PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT</b>
<b>PH.01</b>	<b>Inventarisasi Potensi dan Pendampingan</b>
<b>01.01</b>	<b>Identifikasi dan Inventarisasi Potensi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi nama-nama penerima manfaat yang telah mendapatkan sertifikat dan inventarisasi potensi yang dimiliki daerah ( <i>Database</i> nama penerima dan potensi daerah).
<b>01.02</b>	<b>Pendampingan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan usaha yang dilakukan masyarakat (Laporan pendampingan, laporan monitoring evaluasi).
<b>PH.02</b>	<b>Fasilitasi dan Kerja Sama</b>
<b>02.01</b>	<b>Fasilitasi dan Kerja Sama Lembaga Pemerintah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan MoU kerja sama dengan lembaga pemerintah dalam rangka fasilitasi pendampingan masyarakat terhadap lembaga keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi
<b>02.02</b>	<b>Fasilitasi dan Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan MoU kerja sama dengan lembaga non pemerintah dalam rangka fasilitasi pendampingan masyarakat. (MoU, laporan kegiatan fasilitasi dan laporan monev)
<b>PH.03</b>	<b>Pengembangan dan Diseminasi Model Pemberdayaan Masyarakat (Biasa)</b>
<b>03.01</b>	<b>Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat berdasarkan data-data potensi di daerah (data model pemberdayaan masyarakat)
<b>03.02</b>	<b>Diseminasi Model Pemberdayaan Masyarakat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan diseminasi model pemberdayaan masyarakat kepada lembaga terkait

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>PG</b>	<b>PENATAGUNAAN TANAH</b>
<b>PG.01</b>	<b>Perencanaan Penatagunaan Tanah</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan program penatagunaan tanah.
<b>01.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan program penatagunaan tanah.
<b>01.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan program penatagunaan tanah.
<b>PG.02</b>	<b>Evaluasi Penatagunaan Tanah</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan, verifikasi dan evaluasi persediaan tanah regional dan sektoral serta pelaporan penatagunaan tanah.
<b>02.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan, verifikasi dan evaluasi persediaan tanah regional dan sektoral serta pelaporan penatagunaan tanah.
<b>02.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan, verifikasi dan evaluasi persediaan tanah regional dan sektoral serta pelaporan penatagunaan tanah.
<b>PG.03</b>	<b>Data Penatagunaan Tanah</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan pengelolaan data, pembangunan sistem informasi geografis serta pelaporan data penatagunaan tanah.
<b>03.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dan pengelolaan data, pembangunan sistem informasi geografis serta pelaporan data penatagunaan tanah.
<b>03.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan dan pengelolaan data,

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	pembangunan sistem informasi geografis serta pelaporan data penatagunaan tanah.
<b>PG.04</b>	<b>Neraca Penatagunaan Tanah</b>
<b>04.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan neraca penatagunaan tanah nasional, regional dan sektoral.
<b>04.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan neraca penatagunaan tanah nasional, regional dan sektoral.
<b>04.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan neraca penatagunaan tanah nasional, regional dan sektoral.
<b>PG.05</b>	<b>Penatagunaan Tanah Kawasan Perkotaan</b>
<b>05.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan termasuk tanah kritis dan tanah Negara bekas kawasan, analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan pemantauan perubahan penggunaan tanah pada kawasan perkotaan serta pelaporan
<b>05.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan termasuk tanah kritis dan tanah Negara bekas kawasan, analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan pemantauan perubahan penggunaan tanah pada kawasan perkotaan serta pelaporan.
<b>05.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan termasuk tanah kritis dan tanah Negara bekas kawasan, analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan pemantauan perubahan penggunaan tanah pada kawasan perkotaan serta pelaporan.
<b>PG.06</b>	<b>Penatagunaan Tanah Kawasan Pedesaan</b>
<b>06.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan termasuk tanah kritis dan tanah Negara bekas kawasan, analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan pemantauan perubahan penggunaan tanah pada kawasan perdesaan.
<b>06.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan termasuk tanah kritis dan tanah Negara bekas kawasan, analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan pemantauan perubahan penggunaan tanah pada kawasan perdesaan.
<b>06.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan termasuk tanah kritis dan tanah Negara bekas kawasan, analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan pemantauan perubahan penggunaan tanah pada kawasan perdesaan.
<b>PS</b>	<b>PENATAAN WILAYAH PESISIR, PULAU-PULAU KECIL, PERBATASAN DAN WILAYAH TERTENTU</b>
<b>PS.01</b>	<b>Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah tertentu</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan dan penyusunan kebijakan Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan konsep final.
<b>PS.02</b>	<b>Penataan dan Pemantauan Wilayah Pesisir</b>
<b>02.01</b>	<b>Penataan Wilayah Pesisir</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan kawasan wilayah pesisir
<b>02.02</b>	<b>Inventarisasi dan Identifikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi pertanahan di wilayah pesisir
<b>02.03</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan/monitoring dan evaluasi kawasan wilayah pesisir
<b>02.04</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pemantauan wilayah pesisir
<b>02.05</b>	<b>Data dan Informasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan basis data di bidang penataan dan pemantauan wilayah pesisir

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>PS.03</b>	<b>Penataan dan Pemantauan Pulau-Pulau Kecil</b>
<b>03.01</b>	<b>Penataan Pulau-Pulau Kecil</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan Pulau-Pulau Kecil
<b>03.02</b>	<b>Inventarisasi dan Identifikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi pertanahan di Pulau-Pulau Kecil
<b>03.03</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan/monitoring dan evaluasi Pulau-Pulau Kecil
<b>03.04</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penataan dan Pemantauan Pulau-Pulau Kecil
<b>03.05</b>	<b>Data dan Informasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan basis data di bidang Penataan dan Pemantauan Pulau-Pulau Kecil
<b>PS.04</b>	<b>Penataan dan Pemantauan Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu</b>
<b>04.01</b>	<b>Penataan Wilayah perbatasan dan Wilayah Tertentu</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan Wilayah perbatasan dan Wilayah Tertentu
<b>04.02</b>	<b>Inventarisasi dan Identifikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi pertanahan di Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu
<b>04.03</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan/monitoring dan evaluasi Wilayah perbatasan dan Wilayah Tertentu
<b>04.04</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penataan dan Pemantauan Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu
<b>04.05</b>	<b>Data dan Informasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan basis data di bidang Penataan dan Pemantauan Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu
<b>KT</b>	<b>KONSOLIDASI TANAH</b>
<b>KT.01</b>	<b>Potensi Objek Konsolidasi Tanah</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan potensi objek konsolidasi tanah dan pelaksanaan sosialisasi potensi objek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.
<b>01.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan potensi objek konsolidasi tanah dan pelaksanaan sosialisasi potensi objek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>01.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan potensi objek konsolidasi tanah dan pelaksanaan sosialisasi potensi objek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.
<b>KT.02</b>	<b>Perencanaan Konsolidasi Tanah</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan program dan anggaran, bimbingan teknis, dan pengembangan potensi objek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.
<b>02.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan program dan anggaran, bimbingan teknis, dan pengembangan potensi objek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.
<b>02.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran, bimbingan teknis, dan pengembangan potensi objek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.
<b>KT.03</b>	<b>Penataan</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan desain konsolidasi tanah.
<b>03.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan desain konsolidasi tanah.
<b>03.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan desain konsolidasi tanah.
<b>KT.04</b>	<b>Kerja Sama</b>
<b>04.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat.
<b>04.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>04.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat.
<b>KT.05</b>	<b>Pemantauan</b>
<b>05.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan dan pengelolaan data potensi objek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.
<b>05.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan dan pengelolaan data potensi objek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.
<b>05.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan pengelolaan data potensi objek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.
<b>KT.06</b>	<b>Evaluasi</b>
<b>06.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi objek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.
<b>06.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi objek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.
<b>06.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi objek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.
<b>LR</b>	<b>LANDREFORM</b>
<b>LR.01</b>	<b>Inventarisasi Tanah Objek Landreform</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi tanah objek landreform.
<b>01.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi tanah objek landreform.
<b>01.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi tanah objek landreform.
<b>LR.02</b>	<b>Pengelolaan Data Landreform</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan data landreform.
<b>02.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data landreform.
<b>02.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data landreform.
<b>LR.03</b>	<b>Penguasaan Tanah Objek Landreform</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguasaan tanah objek landreform.
<b>03.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguasaan tanah objek landreform.
<b>03.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguasaan tanah objek landreform.
<b>LR.04</b>	<b>Ganti Kerugian Tanah Objek Landreform</b>
<b>04.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian ganti kerugian tanah objek landreform.
<b>04.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberian ganti kerugian tanah objek landreform.
<b>04.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian ganti kerugian tanah objek landreform.
<b>LR.05</b>	<b>Redistribusi Tanah</b>
<b>05.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang redistribusi tanah.



<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>05.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang redistribusi tanah.
<b>05.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang redistribusi tanah.
<b>LR.06</b>	<b>Pemanfaatan Bersama</b>
<b>06.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan bersama atas tanah.
<b>06.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan bersama atas tanah.
<b>06.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan bersama atas tanah.
<b>LR.07</b>	<b>Data-Data Landreform</b>
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan data-data landreform antara lain IP4T, SK Penegasan, dokumen pembayaran ganti rugi, penertiban administrasi landreform (Buku A dan B), dokumen tanah objek landreform, dokumen redistribusi tanah, dokumen penyelesaian masalah landreform.
<b>TP</b>	<b>PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH</b>
<b>TP.01</b>	<b>Pemanfaatan Tanah Instansi</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan tanah instansi.
<b>01.02</b>	<b>Bimbingan Teknis, Supervisi dan Perizinan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan perizinan di bidang pemanfaatan tanah instansi.
<b>01.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan tanah instansi.
<b>TP.02</b>	<b>Pemanfaatan Tanah Badan Usaha Pemerintah</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan tanah badan usaha pemerintah.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>02.02</b>	<b>Bimbingan Teknis, Supervisi dan Perizinan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan perizinan di bidang pemanfaatan tanah badan usaha pemerintah.
<b>02.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan tanah badan usaha pemerintah.
<b>TP.03</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Instansi</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah instansi.
<b>03.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah instansi.
<b>03.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah instansi.
<b>TP.04</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Badan Usaha Pemerintah</b>
<b>04.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah badan usaha pemerintah.
<b>04.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah badan usaha pemerintah.
<b>04.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah badan usaha pemerintah.
<b>BP</b>	<b>PEMBINAAN PENGADAAN DAN PENETAPAN TANAH PEMERINTAH</b>
<b>BP.01</b>	<b>Bina Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah Pemerintah</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>01.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.
<b>01.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.
<b>BP.02</b>	<b>Bina Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengadaan tanah pemerintah.
<b>02.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengadaan tanah pemerintah.
<b>02.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan tanah pemerintah.
<b>BP.03</b>	<b>Penetapan Hak Pengelolaan Atas Tanah Pemerintah</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penetapan Hak Pengelolaan.
<b>03.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penetapan Hak Pengelolaan.
<b>03.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Hak Pengelolaan.
<b>BP.04</b>	<b>Penetapan Hak Atas Tanah</b>
<b>04.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penetapan Hak Atas Tanah.
<b>04.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penetapan Hak Atas Tanah.
<b>04.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Hak Atas Tanah.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>PT</b>	<b>PENILAIAN TANAH</b>
<b>PT.01</b>	<b>Bina Penilaian Tanah</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan penilai tanah
<b>01.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penilai tanah
<b>01.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penilai tanah
<b>PT.02</b>	<b>Pengadaan dan Kendali Mutu Penilaian Bidang Tanah dan Properti</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengadaan dan Kendali Mutu Penilaian Bidang Tanah dan Properti.
<b>02.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengadaan dan Kendali Mutu Penilaian Bidang Tanah dan Properti.
<b>02.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengadaan dan Kendali Mutu Penilaian Bidang Tanah dan Properti.
<b>PT.03</b>	<b>Bina Zona Nilai Tanah</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta zona nilai tanah.
<b>03.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta zona nilai tanah.
<b>03.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembuatan peta zona nilai tanah.
<b>PT.04</b>	<b>Kendali Mutu Zona Nilai Tanah</b>
<b>04.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan zona nilai tanah.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>04.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan zona nilai tanah.
<b>04.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan zona nilai tanah.
<b>PT.05</b>	<b>Bina Zona Nilai Ekonomi Kawasan</b>
<b>05.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan.
<b>05.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan.
<b>05.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembuatan peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan.
<b>PT.06</b>	<b>Kendali Mutu Nilai Ekonomi Kawasan</b>
<b>06.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan.
<b>06.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan.
<b>06.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan.
<b>MR</b>	<b>PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>
<b>MR.01</b>	<b>Perencanaan Pemanfaatan Ruang</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pengendalian pemanfaatan ruang,
<b>01.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>01.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
<b>MR.02</b>	<b>Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
<b>02.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengadaan dan kendali mutu penilaian bidang pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah.
<b>02.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah.
<b>MR.03</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah.
<b>03.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah.
<b>03.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah.
<b>PM</b>	<b>PENERTIBAN DAN PEMANFAATAN RUANG</b>
<b>PM.01</b>	<b>Perencanaan</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan penertiban pemanfaatan ruang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan konsep final.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>01.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan penertiban pemanfaatan ruang.
<b>01.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penertiban pemanfaatan ruang.
<b>PM.02</b>	<b>Pedoman</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan pedoman penertiban pemanfaatan ruang.
<b>02.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan pedoman penertiban pemanfaatan ruang.
<b>02.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan pedoman penertiban pemanfaatan ruang.
<b>PM.03</b>	<b>Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah.
<b>03.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah.
<b>03.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>PP</b>	<b>PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN PERTANAHAN</b>
<b>PP.01</b>	<b>Pengendalian Penerapan Kebijakan Pertanahan</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penerapan kebijakan pertanahan.
<b>01.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penerapan kebijakan pertanahan.
<b>01.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang pengendalian penerapan kebijakan pertanahan.
<b>PP.02</b>	<b>Pengendalian Program Pertanahan</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian program pertanahan.
<b>02.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian program pertanahan.
<b>02.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian program pertanahan.
<b>PP.03</b>	<b>Pemantauan Tanah Pertanian</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan tanah pertanian.
<b>03.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan tanah pertanian.
<b>03.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan tanah pertanian.
<b>PP.04</b>	<b>Evaluasi Tanah Pertanian</b>
<b>04.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang evaluasi dan pembinaan pemanfaatan tanah pertanian.



<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>04.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang evaluasi dan pembinaan pemanfaatan tanah pertanian.
<b>04.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pembinaan pemanfaatan tanah pertanian.
<b>PP.05</b>	<b>Pemantauan Tanah Non Pertanian</b>
<b>05.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian program pertanahan.
<b>05.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian program pertanahan.
<b>05.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian program pertanahan.
<b>PP.06</b>	<b>Evaluasi Tanah Non Pertanian</b>
<b>06.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang evaluasi dan pembinaan pemanfaatan tanah non pertanian.
<b>06.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang evaluasi dan pembinaan pemanfaatan tanah non pertanian.
<b>06.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pembinaan pemanfaatan tanah non pertanian.
<b>TL</b>	<b>PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR</b>
<b>TL.01</b>	<b>Identifikasi Potensi Tanah Terlantar</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan verifikasi potensi tanah terlantar serta pengelolaan data tanah terlantar mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan konsep final.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>01.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan verifikasi potensi tanah terlantar serta pengelolaan data tanah terlantar.
<b>01.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang identifikasi dan verifikasi potensi tanah terlantar serta pengelolaan data tanah terlantar.
<b>TL.02</b>	<b>Pengelolaan Data Tanah Terlantar</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan data tanah terlantar.
<b>02.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data tanah terlantar.
<b>02.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data tanah terlantar.
<b>TL.03</b>	<b>Penertiban Tanah Terlantar</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penertiban tanah terlantar.
<b>03.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penertiban tanah terlantar.
<b>03.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban tanah terlantar.
<b>TL.04</b>	<b>Penetapan Tanah Terlantar</b>
<b>04.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan tanah terlantar.
<b>04.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penetapan tanah terlantar.
<b>04.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan tanah terlantar.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>TL.05</b>	<b>Analisis pemanfaatan Tanah Terlantar</b>
<b>05.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis pemanfaatan tanah terlantar.
<b>05.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis pemanfaatan tanah terlantar.
<b>05.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis pemanfaatan tanah terlantar.
<b>TL.06</b>	<b>Peruntukan Tanah Terlantar</b>
<b>06.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peruntukan tanah terlantar.
<b>06.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peruntukan tanah terlantar.
<b>06.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peruntukan tanah terlantar.
<b>SK</b>	<b>SENGKETA DAN KONFLIK TANAH DAN RUANG WILAYAH</b>
<b>SK.01</b>	<b>Pencegahan dan Pembatalan (Wilayah 1A- IB)</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang, serta melaksanakan pembatalan hak atas tanah.
<b>01.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang, serta melaksanakan pembatalan hak atas tanah.
<b>01.03</b>	<b>Pemantauan, evaluasi dan pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang, serta melaksanakan pembatalan hak atas tanah.
<b>SK.02</b>	<b>Sengketa Tanah dan Ruang (Wilayah 1A- IB)</b>
<b>02.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	kriteria di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian sengketa tanah dan ruang.
<b>02.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian sengketa tanah dan ruang.
<b>02.03</b>	<b>Pemantauan, evaluasi dan pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian sengketa tanah dan ruang.
<b>SK.03</b>	<b>Konflik Tanah dan Ruang (Wilayah 1A- IB)</b>
<b>03.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang.
<b>03.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang
<b>03.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang
<b>SK.04</b>	<b>Pencegahan dan Pembatalan (Wilayah IIA- IIB)</b>
<b>04.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang, melaksanakan pembatalan hak atas tanah.
<b>04.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang, melaksanakan pembatalan hak atas tanah.
<b>04.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang, melaksanakan pembatalan hak atas tanah.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>SK.05</b>	<b>Sengketa Tanah dan Ruang (Wilayah IIA – IIB)</b>
<b>05.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian sengketa tanah dan ruang.
<b>05.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian sengketa tanah dan ruang.
<b>05.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian sengketa tanah dan ruang.
<b>SK.06</b>	<b>Konflik Tanah dan Ruang (Wilayah IIA – IIB)</b>
<b>06.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang.
<b>06.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang.
<b>06.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang.
<b>PN</b>	<b>PENANGANAN PERKARA TANAH DAN RUANG</b>
<b>PN.01</b>	<b>Penanganan Perkara Tata Usaha Negara (Wilayah I)</b>
<b>01.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara tata usaha negara, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>01.02</b>	<p><b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara tata usaha negara, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan</p>
<b>01.03</b>	<p><b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara tata usaha negara, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.</p>
<b>PN.02</b>	<b>Penanganan Perkara Perdata (Wilayah I)</b>
<b>02.01</b>	<p><b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara perdata, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.</p>
<b>02.02</b>	<p><b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara perdata, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.</p>
<b>02.03</b>	<p><b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara perdata, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.</p>

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>PN.03</b>	<b>Penanganan Perkara Tata Usaha Negara (Wilayah II)</b>
<b>03.01</b>	<p><b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara tata usaha negara, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.</p>
<b>03.02</b>	<p><b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara tata usaha negara, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.</p>
<b>03.03</b>	<p><b>Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara tata usaha negara, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.</p>
<b>PN.04</b>	<b>Penanganan Perkara Perdata (Wilayah II)</b>
<b>04.01</b>	<p><b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara perdata, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.</p>
<b>04.02</b>	<p><b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara perdata, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.</p>
<b>04.03</b>	<p><b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara</p>

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	tanah dan ruang dalam lingkup perkara perdata, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.
<b>PN.05</b>	<b>Penanganan Perkara Tata Usaha Negara (Wilayah III)</b>
<b>05.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara tata usaha negara, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.
<b>05.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara tata usaha negara, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.
<b>05.03</b>	<b>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara tata usaha negara, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.
<b>PN.06</b>	<b>Penanganan Perkara Perdata (Wilayah III)</b>
<b>06.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara perdata, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.
<b>06.02</b>	<b>Bimbingan Teknis dan Supervisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara perdata,



<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.
<b>06.03</b>	<b>Pemantauan, evaluasi dan pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara perdata, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

II. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

A. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>UP</b>	<b>KETATAUSAHAAN PERTANAHAN WILAYAH</b>
<b>UP 01</b>	<b>Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan</b>
<b>01.01</b>	<b>Perencanaan, Program dan Anggaran</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan perencanaan, program, anggaran strategis pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
<b>01.02</b>	<b>Pengawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
<b>01.03</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program strategis pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
<b>UP.02</b>	<b>Organisasi dan Kepegawaian</b>
<b>02.01</b>	<b>Organisasi dan Tata laksana</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
<b>02.02</b>	<b>Analisis Jabatan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan analisis jabatan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
<b>02.03</b>	<b>Kepegawaian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
<b>02.04</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
<b>UP .03</b>	<b>Keuangan dan Barang Milik Negara</b>
<b>03.01</b>	<b>Keuangan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan pengelolaan urusan keuangan.
<b>03.02</b>	<b>Barang Milik Negara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan pengelolaan dan administrasi barang milik negara
<b>UP.04</b>	<b>Kerumahtanggaan Umum dan Informasi</b>
<b>04.01</b>	<b>Ketatausahaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>04.02</b>	<b>Kerumahtanggaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan seperti : a. Fasilitas Kendaraan Dinas; b. Ruang Rapat/Konsumsi; c. Telekomunikasi; d. Pengamanan; e. Pemeliharaan gedung, kebersihan taman, dan lingkungan kantor.
<b>04.02</b>	<b>Keprotokolan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi kegiatan keprotokolan.
<b>04.03</b>	<b>Perlengkapan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan urusan perlengkapan kantor mulai dari perencanaan pengadaan barang dan jasa (meliputi analisis kebutuhan, tata ruang, daftar rekanan mampu), pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi : Alat Tulis Kantor, perlengkapan kantor, tanah dan bangunan, kendaraan, intalasi/jaringan, peralatan kearsipan, dan lain-lain)
<b>04.04</b>	<b>Layanan Pertanahan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan penyelenggaraan layanan pengadaan, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan.
<b>04.05</b>	<b>Hukum dan Peraturan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
<b>04.06</b>	<b>Hubungan Masyarakat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, serta penanganan pengaduan masyarakat.

B. KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>IP</b>	<b>INFRASTRUKTUR PERTANAHAN</b>
<b>IP.01</b>	<b>Pengukuran dan Pemetaan Dasar</b>
<b>01.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu dan pembinaan tenaga teknis dan surveyor pada Kantor Pertanahan di wilayahnya.
<b>01.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu pada Kantor Pertanahan di wilayahnya.
<b>01.03</b>	<b>Pengelolaan dan Pemutakhiran Peralatan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan, pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya.
<b>01.04</b>	<b>Pengelolaan Basis Data</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial.
<b>01.05</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu.
<b>IP.02</b>	<b>Pengukuran dan Pemetaan Kadastral</b>
<b>02.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral batas bidang tanah, ruang dan perairan.
<b>02.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral.
<b>02.03</b>	<b>Pembukuan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pembukuan pada pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral.
<b>02.04</b>	<b>Pengelolaan Basis Data</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan.
<b>02.05</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>IP.03</b>	<b>Survei dan Pemetaan Tematik</b>
<b>03.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, serta pembinaan tenaga teknis dan petugas survei dan pemetaan tematik pada Kantor Pertanahan di wilayahnya.
<b>03.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan.
<b>03.03</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan.
<b>HP</b>	<b>HUBUNGAN HUKUM PERTANAHAN</b>
<b>HP.01</b>	<b>Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat</b>
<b>01.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan, dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal
<b>01.02</b>	<b>Izin Hak Tanah dan Wakaf</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda, dan bekas tanah asing lainnya.
<b>01.03</b>	<b>Inventarisasi dan Identifikasi Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang, pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.
<b>01.04</b>	<b>Kerja Sama Pemberdayaan Hak Atas Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan penyiapan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.
<b>01.05</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat.
<b>HP.02</b>	<b>Pendaftaran Hak Tanah</b>
<b>02.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan.
<b>02.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan.
<b>02.03</b>	<b>Pembatalan dan Penghapusan Hak Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pencatatan pembatalan hak dan penghapusan hak atas tanah.
<b>02.04</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan pendaftaran hak tanah.
<b>HP.03</b>	<b>Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT</b>
<b>03.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan dan tanah wakaf.
<b>03.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan dalam hal pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan dan tanah wakaf.
<b>03.03</b>	<b>Perizinan, Pelepasan Hak dan Perubahan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan, perubahan pemanfaatan/komoditas, dan peralihan saham.
<b>03.04</b>	<b>PPAT</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan PPAT, pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis.
<b>03.05</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan dan tanah wakaf, serta pembinaan PPAT.
<b>NP</b>	<b>PENATAAN PERTANAHAN</b>
<b>NP.01</b>	<b>Penatagunaan Tanah</b>
<b>01.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	pertanahan dan penatagunaan tanah, serta perubahan penggunaan tanah.
<b>01.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, serta perubahan penggunaan tanah.
<b>01.03</b>	<b>Pengelolaan Data, Informasi dan Inventarisasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi, pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan.
<b>01.04</b>	<b>Kerja Sama Pemberdayaan Hak Atas Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan persiapan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.
<b>01.05</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penatagunaan tanah.
<b>NP.02</b>	<b>Landreform dan Konsolidasi Tanah</b>
<b>02.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan bimbingan teknis pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah objek landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah objek landreform, pengeluaran tanah dari objek landreform, pendayagunaan tanah objek landreform dan ganti kerugian tanah objek landreform, konsolidasi tanah, serta bimbingan partisipasi masyarakat.
<b>02.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah objek landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah objek landreform, pengeluaran tanah dari objek landreform, pendayagunaan tanah objek landreform dan ganti kerugian tanah objek landreform dan konsolidasi tanah.
<b>02.03</b>	<b>Redistribusi, Konsolidasi dan Sosialisasi Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah, pelaksanaan penyusunan potensi objek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi.
<b>02.04</b>	<b>Perencanaan, Desain dan Promosi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan perencanaan, pengembangan desain, promosi, pengelolaan data, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>02.05</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan landreform dan konsolidasi tanah/potensi objek konsolidasi tanah.
<b>NP.03</b>	<b>Penataan Kawasan Tertentu</b>
<b>03.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu.
<b>03.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu.
<b>03.03</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan penataan kawasan tertentu.
<b>AT</b>	<b>PENGADAAN TANAH</b>
<b>AT.01</b>	<b>Pemanfaatan Tanah Pemerintah</b>
<b>01.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan pemberian perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah.
<b>01.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemberian perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah.
<b>01.03</b>	<b>Perizinan, Rekomendasi dan Penghapusan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan



<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah.
<b>01.04</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan tanah pemerintah.
<b>AT.02</b>	<b>Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah</b>
<b>02.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pembinaan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerja sama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, dan badan usaha pemerintah.
<b>02.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan.</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pembinaan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, dan badan usaha pemerintah.
<b>02.03</b>	<b>Perizinan dan Kerja Sama</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerja sama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, dan badan usaha pemerintah.
<b>02.04</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan bina pengadaan dan penetapan tanah pemerintah.
<b>AT.03</b>	<b>Penilaian Tanah</b>
<b>03.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti, pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran, dan kerja sama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber daya agraria, pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan,
<b>03.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti, pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran, dan kerja sama

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber daya agraria, pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan.
<b>03.03</b>	<b>Peta Zona Nilai Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan kerja sama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber daya agraria.
<b>03.04</b>	<b>Informasi dan Komputerisasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan.
<b>03.05</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan penilaian tanah.
<b>MP</b>	<b>PENANGANAN MASALAH DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN</b>
<b>MP.01</b>	<b>Sengketa dan Konflik Pertanahan</b>
<b>01.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah.
<b>01.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah.
<b>01.03</b>	<b>Pembatalan Hak Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah.
<b>01.04</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan sengketa dan konflik pertanahan.
<b>MP.02</b>	<b>Penanganan Perkara Pertanahan</b>
<b>02.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian.
<b>02.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	hasil perdamaian.
<b>02.03</b>	<b>Pembatalan Hak Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan analisis dan menyiapkan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian.
<b>02.04</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan penanganan perkara pertanahan.
<b>MP.03</b>	<b>Pengendalian Pertanahan</b>
<b>03.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan, pelaksanaan penelitian data dan menyiapkan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
<b>03.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan, pelaksanaan penelitian data dan menyiapkan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
<b>03.03</b>	<b>Penelitian Data dan Rekomendasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian data dan menyiapkan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
<b>03.04</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan pengendalian pertanahan.

III. KANTOR PERTANAHAN

A. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>UP</b>	<b>KETATAUSAHAAN PERTANAHAN</b>
<b>UP.01</b>	<b>Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan</b>
<b>01.01</b>	<b>Perencanaan, Program dan Anggaran</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan perencanaan, program, anggaran strategis pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
<b>01.02</b>	<b>Pengawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
<b>01.03</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program strategis pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
<b>UP.02</b>	<b>Umum dan Kepegawaian</b>
<b>02.01</b>	<b>Organisasi dan Tata laksana</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
<b>02.02</b>	<b>Analisis Jabatan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan analisis jabatan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
<b>02.03</b>	<b>Kepegawaian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
<b>02.04</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
<b>UP.03</b>	<b>Keuangan dan Barang Milik Negara</b>
<b>03.01</b>	<b>Keuangan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan pengelolaan urusan keuangan.
<b>03.02</b>	<b>Barang Milik Negara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan pengelolaan dan administrasi barang milik negara
<b>UP.04</b>	<b>Kerumahtanggaan dan Informasi</b>
<b>04.01</b>	<b>Ketatausahaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>04.02</b>	<b>Kerumahtanggaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan seperti : a. Fasilitas Kendaraan Dinas; b. Ruang Rapat/Konsumsi; c. Telekomunikasi; d. Pengamanan; e. Pemeliharaan gedung, kebersihan taman, dan lingkungan kantor.
<b>04.03</b>	<b>Keprotokolan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi kegiatan keprotokolan.
<b>04.04</b>	<b>Perlengkapan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan urusan perlengkapan kantor mulai dari perencanaan pengadaan barang dan jasa (meliputi analisis kebutuhan, tata ruang, daftar rekanan), pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi: Alat Tulis Kantor, perlengkapan kantor, tanah dan bangunan, kendaraan, instalasi/jaringan, peralatan kearsipan, dan lain – lain.
<b>04.05</b>	<b>Layanan Pertanahan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan penyelenggaraan layanan pengadaan, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan.
<b>04.06</b>	<b>Hukum dan Peraturan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
<b>04.07</b>	<b>Hubungan Masyarakat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, serta penanganan pengaduan masyarakat.

B. KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>IP</b>	<b>INFRASTRUKTUR PERTANAHAN</b>
<b>IP.01</b>	<b>Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik</b>
<b>01.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu dan pembinaan tenaga teknis dan surveyor pada Kantor Pertanahan di wilayahnya.
<b>01.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu pada Kantor Pertanahan di wilayahnya.
<b>01.03</b>	<b>Pengelolaan dan Pemutakhiran Peralatan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan, pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya.
<b>01.04</b>	<b>Pengelolaan Basis Data</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial.
<b>01.05</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu.
<b>IP.02</b>	<b>Pengukuran dan Pemetaan Kadastral</b>
<b>02.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral batas bidang tanah, ruang dan perairan.
<b>02.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral.
<b>02.03</b>	<b>Pembukuan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pembukuan pada pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral.
<b>02.04</b>	<b>Pengelolaan Basis Data</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan.
<b>02.05</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>HP</b>	<b>HUBUNGAN HUKUM PERTANAHAN</b>
<b>HP.01</b>	<b>Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat</b>
<b>01.01</b>	<p><b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan, dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal</p>
<b>01.02</b>	<p><b>Izin Hak Tanah dan Wakaf</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda, dan bekas tanah asing lainnya.</p>
<b>01.03</b>	<p><b>Inventarisasi dan Identifikasi Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang, pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.</p>
<b>01.04</b>	<p><b>Kerja Sama Pemberdayaan Hak Atas Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan penyiapan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.</p>
<b>01.05</b>	<p><b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat.</p>
<b>HP.02</b>	<b>Pendaftaran Hak Tanah</b>
<b>02.01</b>	<p><b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan.</p>
<b>02.02</b>	<p><b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan.</p>
<b>02.03</b>	<p><b>Pembatalan dan Penghapusan Hak Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pencatatan pembatalan hak dan penghapusan hak atas tanah.</p>
<b>02.04</b>	<p><b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan pendaftaran hak tanah.</p>

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>HP.03</b>	<b>Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT</b>
<b>03.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan dan tanah wakaf.
<b>03.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan dalam hal pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan dan tanah wakaf.
<b>03.03</b>	<b>Perizinan, Pelepasan Hak dan Perubahan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan, perubahan pemanfaatan/komoditas, dan peralihan saham.
<b>03.04</b>	<b>PPAT</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan PPAT, pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis.
<b>03.05</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan dan tanah wakaf, serta pembinaan PPAT.
<b>NT</b>	<b>PENATAAN PERTANAHAN</b>
<b>NT.01</b>	<b>Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu</b>
<b>01.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, serta perubahan penggunaan tanah.
<b>01.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, serta perubahan penggunaan tanah.
<b>01.03</b>	<b>Pengelolaan Data, Informasi dan Inventarisasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi, pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan.
<b>01.04</b>	<b>Kerjasama Pemberdayaan Hak Atas Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan penyiapan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka



<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.
<b>01.05</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penatagunaan tanah.
<b>NT.02</b>	<b>Landreform dan Konsolidasi Tanah</b>
<b>02.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah objek landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah objek landreform, pengeluaran tanah dari objek landreform, pendayagunaan tanah objek landreform dan ganti kerugian tanah objek landreform, konsolidasi tanah, serta bimbingan partisipasi masyarakat.
<b>02.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan.</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah objek landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah objek landreform, pengeluaran tanah dari objek landreform, pendayagunaan tanah objek landreform dan ganti kerugian tanah objek landreform dan konsolidasi tanah.
<b>02.03</b>	<b>Redistribusi, Konsolidasi dan Sosialisasi Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah, pelaksanaan penyusunan potensi objek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi.
<b>02.04</b>	<b>Perencanaan, Desain dan Promosi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan desain, promosi, pengelolaan data, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah.
<b>02.05</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan landreform dan konsolidasi tanah/potensi objek konsolidasi tanah.
<b>NT.03</b>	<b>Penataan Kawasan Tertentu</b>
<b>03.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu.
<b>03.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu.
<b>03.03</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan penataan kawasan tertentu.
<b>AT</b>	<b>PENGADAAN TANAH</b>
<b>AT.01</b>	<b>Pemanfaatan Tanah Pemerintah</b>
<b>01.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan pemberian perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah.
<b>01.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemberian perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah.
<b>01.03</b>	<b>Perizinan, Rekomendasi dan Penghapusan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah.
<b>01.04</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan penilaian tanah.
<b>AT.02</b>	<b>Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah</b>
<b>02.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>02.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah.
<b>02.03</b>	<b>Perizinan dan Kerja Sama</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerja sama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah.
<b>02.04</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah.
<b>AT.03</b>	<b>Penilaian Tanah</b>
<b>03.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan pemberian perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah.
<b>03.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemberian perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah.
<b>03.03</b>	<b>Peta Zona Nilai Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan kerja sama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber daya agraria.
<b>03.04</b>	<b>Informasi dan Komputerisasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan.
<b>03.05</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan penilaian tanah.

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
<b>MP</b>	<b>PENANGANAN MASALAH DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN</b>
<b>MP.01</b>	<b>Sengketa dan Konflik Pertanahan</b>
<b>01.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah.
<b>01.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah.
<b>01.03</b>	<b>Pembatalan Hak Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah.
<b>01.04</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan sengketa dan konflik pertanahan.
<b>MP.02</b>	<b>Penanganan Perkara Pertanahan</b>
<b>02.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah.
<b>02.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah.
<b>02.03</b>	<b>Pembatalan Hak Tanah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah.
<b>02.04</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan sengketa dan konflik pertanahan.
<b>MP.03</b>	<b>Pengendalian Pertanahan</b>
<b>03.01</b>	<b>Bimbingan Teknis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan, pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
<b>03.02</b>	<b>Koordinasi dan Pemantauan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan

<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>
	pertanahan, pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
<b>03.03</b>	<b>Penelitian Data dan Rekomendasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
<b>03.04</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan pengendalian pertanahan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL